

Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan BUMDes Berbasis Digital untuk Meningkatkan Kapasitas Manajerial di Desa Poter Kabupaten Bangkalan

Indien Winarwati¹, Ach. Mus'if², Moh. Karim³, Achmad Thoriqil Huda⁴, Tri Pujiati⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

Email: indien.winarwati@trunojoyo.ac.id¹, musif@trunojoyo.ac.id²,
karim@trunojoyo.ac.id³, thoriqilhuda870@gmail.com⁴, tri.pujiati@trunojoyo.ac.id⁵

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received: April 20, 2026 Revised: June 15, 2026 Accepted: June 23, 2026</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>The difficulties in preparing accountable financial reports, planning business development strategies, and managing business operations effectively remain major challenges faced by the managers of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Poter Village, Tanah Merah District, Bangkalan Regency. These limitations have hindered the optimal growth of several business units, with some experiencing stagnation and limited contribution to local economic development. The condition indicates that strengthening managerial and financial management capacities is essential to improve the performance and sustainability of BUMDes. This community service activity aims to enhance the capacity of BUMDes managers through a structured training program. The implementation methods include preliminary observation, training sessions, mentoring, and evaluation through interviews and documentation. The training materials focus on business management, basic accounting, and financial reporting preparation. This activity is also aligned with the Sustainable Development Goals initiated by the United Nations, particularly Goal 1 (No Poverty), Goal 8 (Decent Work and Economic Growth), and Goal 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure). By strengthening managerial and financial capacities, this program contributes to improving income-generating activities, fostering local entrepreneurship, and supporting sustainable rural economic development. The results show an improvement in participants' understanding and skills in business management, as well as increased awareness of the importance of proper administration and financial reporting. Participants also demonstrated positive responses to the program. Furthermore, the outcomes of this program indicate its contribution to achieving SDGs targets at the village level, especially in enhancing economic resilience and institutional capacity of community-based enterprises. Therefore, this training and mentoring activity is effective in strengthening the capacity of BUMDes managers and contributes to improving performance and sustainability of village enterprises. Similar programs should be conducted continuously to ensure optimal development of BUMDes and to enhance rural community welfare.</p>
<p>Keywords: BUMDes community service business management financial reporting Sustainable Development Goals</p>	<p>To cite this article: Winarwati, I., Mus'if, A., Karim, M., Huda, A. T., & Pujiati, T. (2026). Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan BUMDes Berbasis Digital untuk Meningkatkan Kapasitas Manajerial di Desa Poter Kabupaten Bangkalan. <i>Journal of KERIS: Journal of Community Engagement</i>, 6(1), 10-21.</p>



Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi desa yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Keberadaan BUMDes diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli desa (Republik Indonesia, 2014; Sutoro, 2019). Selain itu, BUMDes juga menjadi instrumen penting dalam penguatan ekonomi berbasis komunitas (Sari, 2024). Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat (PKM), penguatan kapasitas pengelola BUMDes secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals yang diinisiasi oleh United Nations, khususnya: (1) Tujuan 1 (No Poverty) melalui peningkatan pendapatan masyarakat desa berbasis usaha lokal; (2) Tujuan 8 (Decent Work and Economic Growth) melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan kewirausahaan desa; serta (3) Tujuan 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) melalui pengembangan inovasi usaha dan pemanfaatan teknologi sederhana dalam pengelolaan BUMDes. Secara lebih operasional, kegiatan PKM ini diarahkan untuk mendukung target SDGs berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia desa, penguatan tata kelola usaha yang akuntabel, serta perluasan akses pasar melalui digitalisasi, sehingga BUMDes mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan (United Nations, 2015).

Namun demikian, implementasi BUMDes di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek kapasitas sumber daya manusia. Keterbatasan kemampuan manajerial, perencanaan usaha, dan pelaporan keuangan menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi kinerja BUMDes (Sofyani et al., 2020). Kondisi ini diperparah dengan rendahnya literasi keuangan dan inovasi usaha di tingkat pengelola desa yang berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan unit usaha (Wibowo & Saptono, 2021). Selain itu, transformasi digital yang belum merata juga menjadi tantangan baru dalam pengembangan BUMDes (Nugroho et al., 2023).

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, ditemukan bahwa sebagian besar pengurus BUMDes masih mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel, merencanakan pengembangan usaha, serta mengelola operasional secara efektif. Akibatnya, beberapa unit usaha belum berkembang secara optimal dan bahkan mengalami stagnasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pengelola menjadi faktor kunci dalam keberhasilan BUMDes.

Sejumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes. Zahrudin et al. (2023) menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan partisipatif mampu meningkatkan keterampilan manajerial pengelola desa. Sari (2024) membuktikan bahwa pendekatan partisipatif mampu merevitalisasi unit usaha BUMDes yang sebelumnya tidak aktif. Selain itu, Nugroho et al. (2023) menekankan bahwa digitalisasi melalui media sederhana seperti WhatsApp Business dapat meningkatkan akses pasar dan efektivitas pemasaran BUMDes.

Meskipun berbagai kegiatan tersebut telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan (gap) yaitu belum adanya model pelatihan yang benar-benar terintegrasi secara



komprehensif yang mencakup aspek manajemen usaha, kewirausahaan, dan pelaporan keuangan dalam satu sistem pelatihan yang berkelanjutan. Sebagian besar program masih bersifat parsial dan belum berorientasi pada penguatan kapasitas secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelola BUMDes melalui pelatihan yang terstruktur dan terintegrasi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pengelola BUMDes dalam aspek perencanaan usaha, manajemen keuangan, dan operasionalisasi usaha desa. Diharapkan melalui kegiatan ini, BUMDes dapat menjadi lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan pada bulan Oktober–Desember 2025. Kegiatan diawali dengan observasi awal untuk mengidentifikasi permasalahan pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama pada aspek manajemen usaha dan pelaporan keuangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap mulai dari koordinasi dengan pemerintah desa, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, hingga evaluasi akhir. Pendekatan bertahap ini penting dalam memastikan keberhasilan program pemberdayaan berbasis komunitas di tingkat desa (Prasetyo et al., 2021).

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah 15 pengurus BUMDes Desa Poter yang terdiri atas 1 ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara, dan 12 pengelola unit usaha. Peserta dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan pengembangan usaha BUMDes. Keterlibatan peserta dilakukan secara aktif melalui diskusi, praktik langsung, dan simulasi penyusunan laporan keuangan serta perencanaan usaha. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan peserta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes sekaligus menerapkan solusi yang diperoleh selama pelatihan. Pendekatan tersebut terbukti meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Handayani et al., 2020).

Metode pengabdian yang digunakan adalah *Community-Based Development* (Comdev) dengan pendekatan *capacity building*. Metode ini menekankan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pelatihan dilakukan melalui ceramah, diskusi, dan praktik langsung yang berfokus pada peningkatan kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan akuntansi dasar. Integrasi pelatihan secara holistik menjadi strategi penting dalam penguatan kelembagaan ekonomi desa (Suryani et al., 2023).

Indikator keberhasilan kegiatan ini dilihat dari peningkatan kemampuan peserta dalam mengelola usaha dan menyusun laporan keuangan sederhana. Selain itu, keberhasilan juga diukur dari meningkatnya pemahaman pengelola terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif peserta, sedangkan hambatan utama adalah perbedaan tingkat pemahaman awal peserta (Putra & Kurniawan, 2022).

Evaluasi kegiatan dilakukan secara formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses kegiatan melalui observasi dan diskusi, sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir kegiatan melalui wawancara dan refleksi bersama. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelatihan serta menjadi dasar perbaikan program di



masa mendatang. Pendekatan evaluasi berbasis partisipasi dinilai efektif dalam meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat desa (Sofyani et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

A. Alur Kegiatan Pendampingan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan berkesinambungan. Kegiatan ini diawali dari tahap pendahuluan yang mencakup observasi lapangan dan identifikasi permasalahan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi pengelolaan BUMDes serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, khususnya pada aspek administrasi keuangan, manajemen usaha, dan pemasaran produk. Selain itu, dilakukan pula komunikasi awal dengan pemerintah desa dan pengurus BUMDes untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual, kebutuhan prioritas, serta potensi pengembangan usaha yang dapat dioptimalkan.

Tahap berikutnya adalah proses koordinasi dan perencanaan kegiatan pendampingan. Pada tahap ini, tim pelaksana bersama pihak desa menyepakati bentuk kegiatan, materi pelatihan, serta jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu pengurus BUMDes. Dari hasil koordinasi tersebut, dibentuk kelompok dampingan yang terdiri dari pengurus inti BUMDes, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan pengelola unit usaha. Kelompok ini menjadi sasaran utama kegiatan karena memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan operasionalisasi BUMDes.

Setelah kelompok dampingan terbentuk, kegiatan dilanjutkan pada tahap pelaksanaan pendampingan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan pengabdian yang meliputi pelatihan manajemen usaha, pencatatan keuangan sederhana, serta pengenalan digitalisasi pemasaran. Pelatihan manajemen usaha difokuskan pada peningkatan kemampuan pengelola dalam merencanakan, mengorganisasi, dan mengembangkan unit usaha BUMDes secara lebih sistematis. Sementara itu, pelatihan pencatatan keuangan sederhana diarahkan pada kemampuan pengurus dalam membuat pembukuan dasar, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menyusun laporan kas harian secara sederhana namun terstruktur.

Selain aspek keuangan, kegiatan juga mencakup digitalisasi pemasaran sebagai upaya adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dalam kegiatan ini, pengurus BUMDes diperkenalkan dengan penggunaan media digital seperti *WhatsApp Business* untuk memasarkan produk desa. Pendampingan dilakukan secara langsung melalui praktik pembuatan katalog produk, pengelolaan komunikasi dengan pelanggan, serta strategi memperluas jangkauan pasar. Pendekatan ini dilakukan secara partisipatif melalui metode ceramah, diskusi interaktif, praktik langsung, dan simulasi kasus agar peserta dapat memahami dan mengimplementasikan materi secara nyata.



Tahap terakhir dari alur kegiatan ini adalah evaluasi pelaksanaan pendampingan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana perubahan kapasitas pengurus BUMDes setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi reflektif, wawancara singkat, serta observasi terhadap hasil kerja peserta, khususnya dalam pencatatan keuangan dan penggunaan media digital. Selain itu, dilakukan juga perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan untuk melihat efektivitas program secara lebih objektif.

Secara keseluruhan, alur kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa proses pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terstruktur mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pembentukan kelompok dampingan, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, hingga evaluasi hasil. Pendekatan bertahap ini tidak hanya memastikan keteraturan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memberikan ruang pembelajaran yang berkelanjutan bagi pengurus BUMDes. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.

B. Kegiatan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, dimulai dari observasi hingga evaluasi kegiatan. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa proses pendampingan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya dalam aspek manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran digital.

1. Observasi dan Identifikasi Masalah

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi langsung di lokasi mitra serta wawancara mendalam dengan pengurus BUMDes dan perangkat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi pengelolaan BUMDes yang sedang berjalan. Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masih belum terstruktur dengan baik, pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual tanpa standar pembukuan yang jelas, serta belum adanya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha.

Selain itu, aspek pemasaran juga masih sangat terbatas pada lingkup lokal dan mengandalkan metode konvensional seperti *word of mouth*. Kondisi ini menyebabkan produk BUMDes kurang dikenal di luar wilayah desa, sehingga potensi pengembangan usaha belum dapat dimaksimalkan secara optimal. Temuan ini menjadi dasar penting dalam merancang intervensi berupa pelatihan dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

2. Pelatihan Manajemen dan Keuangan

Tahap kedua adalah pelatihan manajemen dan keuangan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pengurus BUMDes dalam mengelola usaha secara lebih profesional. Materi pelatihan difokuskan pada penyusunan laporan keuangan sederhana,



pencatatan arus kas harian, serta pemisahan aset usaha dan aset pribadi agar tercipta transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Pelatihan dilakukan menggunakan metode partisipatif melalui kombinasi ceramah singkat, diskusi interaktif, dan praktik langsung. Peserta diberikan contoh kasus sederhana yang kemudian disimulasikan secara langsung agar lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam pengelolaan BUMDes sehari-hari. Pendekatan ini dipilih karena lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman praktis dibandingkan metode teoritis semata.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya administrasi yang tertib sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Dengan adanya pelatihan ini, pengurus BUMDes mulai memahami pentingnya pencatatan keuangan yang sistematis sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga desa.



Gambar 1. Sosialisasi Kegiatan Peneglolaan BumDes

3. Pendampingan Digitalisasi Pemasaran

Tahap ketiga adalah pendampingan dalam bidang digitalisasi pemasaran. Pada tahap ini, pengurus BUMDes diperkenalkan dengan pemanfaatan teknologi digital sederhana, yaitu *WhatsApp Business*, sebagai sarana pemasaran produk desa. Pemilihan media ini didasarkan pada kemudahan penggunaan serta aksesibilitas yang tinggi bagi masyarakat desa.

Pendampingan dilakukan secara langsung dengan memberikan bimbingan teknis kepada peserta, mulai dari pembuatan akun bisnis, penyusunan katalog produk, pengunggahan foto produk, hingga strategi komunikasi dengan pelanggan. Pengurus juga dilatih untuk merespon pelanggan secara profesional dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia untuk meningkatkan jangkauan pemasaran.

Melalui kegiatan ini, terjadi perubahan pola pemasaran dari sebelumnya yang bersifat konvensional menjadi lebih modern dan berbasis digital. Hal ini membuka peluang perluasan pasar yang lebih luas di luar wilayah desa.

4. Evaluasi Kegiatan

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan yang dilakukan melalui diskusi kelompok dan refleksi bersama antara tim pelaksana dan pengurus BUMDes. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan pengurus BUMDes dalam aspek manajemen keuangan dan pemasaran digital. Peserta juga menunjukkan antusiasme yang tinggi serta kemampuan untuk mulai menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pengelolaan usaha sehari-hari.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang disertai pendampingan langsung mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas pengelola BUMDes, baik dari aspek administrasi, keuangan, maupun pemasaran.

C. Keberhasilan Program Pendampingan

Keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat di Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, dapat dilihat dari adanya perubahan signifikan pada kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setelah dilaksanakannya kegiatan pelatihan dan pendampingan. Secara umum, kegiatan ini berhasil mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan kemampuan manajerial, administrasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha desa.

Sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, kondisi BUMDes masih menunjukkan keterbatasan dalam aspek tata kelola usaha. Pengelolaan keuangan dilakukan secara sederhana tanpa sistem pembukuan yang baku, sehingga transaksi tidak tercatat secara sistematis. Selain itu, tidak terdapat pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi pengurus dengan keuangan usaha, yang berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam pengelolaan aset. Dari sisi manajemen usaha, perencanaan kegiatan juga masih bersifat informal dan belum berbasis data keuangan yang terstruktur. Kondisi awal ini menunjukkan bahwa BUMDes belum sepenuhnya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya Tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif) dan Tujuan 9 (inovasi dan infrastruktur), karena lemahnya tata kelola dan kapasitas kelembagaan menjadi hambatan dalam menciptakan usaha desa yang produktif dan berkelanjutan.

Setelah dilakukan intervensi berupa pelatihan dan pendampingan, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada pola pengelolaan BUMDes. Pengurus mulai mampu menerapkan pencatatan keuangan sederhana menggunakan buku kas harian yang lebih terstruktur. Selain itu, mulai diterapkan prinsip pemisahan antara aset pribadi dan aset usaha, yang menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan lembaga ekonomi desa. Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan



pemahaman pengurus terhadap pentingnya tata kelola keuangan yang baik sebagai dasar keberlanjutan usaha. Perubahan ini secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, terutama dalam memperkuat institusi ekonomi lokal yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Dari aspek pemasaran, perubahan juga terlihat cukup jelas. Sebelum kegiatan, pemasaran produk BUMDes hanya dilakukan secara konvensional melalui metode *word of mouth* yang terbatas pada lingkungan sekitar desa. Setelah pendampingan, pengurus mulai memanfaatkan media digital sederhana berupa *WhatsApp Business* sebagai sarana promosi dan komunikasi dengan pelanggan. Penggunaan platform ini memungkinkan produk BUMDes menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada wilayah desa, tetapi juga antar kecamatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan adaptasi teknologi digital oleh pengelola BUMDes. Adopsi teknologi digital ini mendukung pencapaian SDGs Tujuan 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) melalui pemanfaatan teknologi sederhana untuk meningkatkan daya saing usaha desa, serta Tujuan 8 melalui perluasan peluang ekonomi.

Selain itu, pada aspek manajemen usaha, pengurus mulai menunjukkan kemampuan dalam menyusun perencanaan usaha secara lebih sistematis. Walaupun masih pada tahap dasar, perubahan ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya perencanaan dalam menjalankan unit usaha desa secara berkelanjutan. Kemampuan perencanaan ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan, selaras dengan agenda SDGs dalam mendorong pembangunan berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari aspek pengetahuan yang diperoleh peserta, tetapi juga dari perubahan perilaku dalam pengelolaan BUMDes. Pendampingan yang dilakukan secara partisipatif terbukti mampu mendorong terjadinya transformasi kapasitas pengelola, baik dalam aspek teknis maupun manajerial. Transformasi ini menunjukkan kontribusi nyata program PKM terhadap pencapaian SDGs Tujuan 1 (No Poverty) melalui penguatan ekonomi desa berbasis usaha lokal, serta Tujuan 8 melalui peningkatan kapasitas kerja dan kewirausahaan masyarakat desa.

Ringkasan perubahan kondisi mitra sebelum dan sesudah kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Administrasi Keuangan	Tidak terstruktur, manual, tidak rutin	Menggunakan buku kas sederhana, mulai teratur
Pemasaran	Lokal dan konvensional	Digital melalui WhatsApp Business, jangkauan lebih luas



Indikator	Kondisi Awal	Kondisi Akhir
Manajemen Usaha	Tidak sistematis	Mulai terarah dan berbasis perencanaan sederhana

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan yang disertai pendampingan langsung (*mentoring*) lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDes dibandingkan pelatihan tanpa tindak lanjut. Dengan demikian, program ini memberikan kontribusi nyata dalam penguatan tata kelola BUMDes yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi desa. Secara lebih luas, capaian ini memperlihatkan bahwa model PKM yang terintegrasi dapat menjadi strategi implementatif dalam mendukung lokalisasi SDGs di tingkat desa, khususnya dalam memperkuat peran BUMDes sebagai pilar ekonomi masyarakat.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki pengaruh langsung terhadap perbaikan tata kelola usaha desa. Peningkatan ini terutama terlihat pada aspek administrasi keuangan, di mana sebelumnya pencatatan dilakukan secara tidak terstruktur dan tidak konsisten, kemudian berubah menjadi lebih sistematis melalui penerapan buku kas sederhana. Perubahan ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik (*hands-on training*) efektif dalam meningkatkan literasi keuangan serta mendorong akuntabilitas pengelolaan organisasi desa, sebagaimana juga ditegaskan dalam penelitian Sofyani et al. (2020) yang menyatakan bahwa kapasitas pengelola berperan penting dalam peningkatan kinerja BUMDes. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Prawoto et al. (2023) yang menekankan bahwa penguatan kapasitas pelaporan keuangan merupakan faktor kunci dalam keberlanjutan BUMDes. Dalam perspektif SDGs, peningkatan literasi keuangan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia desa sebagai prasyarat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penerapan sistem pencatatan keuangan sederhana tidak hanya berdampak pada aspek teknis administrasi, tetapi juga memperkuat prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes. Transparansi dan akuntabilitas menjadi lebih terjamin karena setiap transaksi mulai terdokumentasi dengan lebih baik. Hal ini penting mengingat BUMDes merupakan lembaga ekonomi berbasis masyarakat yang mengelola sumber daya publik sehingga harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Hal ini juga diperkuat oleh Wibowo dan Saptono (2021) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja kelembagaan ekonomi desa. Penguatan tata kelola ini selaras dengan prinsip SDGs dalam membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat.

Pada aspek pemasaran, terjadi transformasi signifikan melalui adopsi teknologi digital sederhana berupa *WhatsApp Business*. Penggunaan media ini menunjukkan adanya proses difusi inovasi dalam konteks pedesaan, di mana teknologi yang mudah digunakan dapat diterima dengan cepat oleh pelaku usaha lokal. Inovasi ini terbukti mampu memperluas jangkauan pemasaran produk BUMDes yang sebelumnya hanya bersifat lokal menjadi lebih luas hingga antar wilayah kecamatan. Temuan ini sejalan dengan Nugroho et al. (2023) yang



menyatakan bahwa digitalisasi pada UMKM dan usaha desa berkontribusi signifikan dalam meningkatkan akses pasar dan daya saing produk lokal. Selain itu, studi oleh Arifin et al. (2022) juga menegaskan bahwa pemanfaatan media digital sederhana dapat meningkatkan efektivitas promosi usaha berbasis desa. Hal ini mempertegas kontribusi program terhadap pencapaian SDGs Tujuan 9 dan Tujuan 8 melalui integrasi inovasi dan penguatan ekonomi lokal berbasis teknologi.

Secara lebih luas, hasil kegiatan ini menegaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi BUMDes tidak semata-mata terletak pada keterbatasan modal usaha, tetapi lebih pada rendahnya kapasitas manajerial, lemahnya sistem administrasi, serta terbatasnya literasi digital pengelola. Hal ini sesuai dengan temuan Putra dan Kurniawan (2022) yang menyoroti bahwa tantangan utama BUMDes di Indonesia adalah aspek sumber daya manusia dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, pendekatan pendampingan (*mentoring*) menjadi lebih efektif dibandingkan pelatihan satu kali karena memungkinkan terjadinya proses *learning by doing* yang berkelanjutan, sebagaimana juga ditemukan dalam studi Suryani et al. (2023). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip SDGs yang menekankan pembangunan berbasis kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, kegiatan ini memperkuat temuan bahwa penguatan kelembagaan BUMDes harus disertai dengan peningkatan kompetensi teknis pengelola secara simultan (Fitria et al., 2021). Namun demikian, kebaruan dari kegiatan ini terletak pada integrasi antara pelatihan manajemen keuangan sederhana dan digitalisasi pemasaran dalam satu model pendampingan terpadu, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga pada penguatan akses pasar berbasis teknologi. Integrasi ini menjadi model implementatif yang relevan dalam mendukung pencapaian berbagai target SDGs di tingkat lokal secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Secara konseptual, kegiatan ini mendukung pendekatan *community-based development* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan. Pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program, sehingga perubahan yang terjadi lebih mudah diinternalisasi dan berpotensi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan UNDP (2021) yang menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program merupakan kunci keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Selain itu, Handayani et al. (2020) juga menegaskan bahwa evaluasi partisipatif dalam program pemberdayaan mampu meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan hasil kegiatan. Pendekatan ini juga merupakan implementasi nyata dari prinsip “no one left behind” dalam SDGs, di mana pembangunan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan BUMDes di Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, menunjukkan adanya perubahan dan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes berdasarkan temuan lapangan selama proses intervensi berlangsung. Secara umum, kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap kemampuan manajerial, khususnya



dalam aspek pencatatan keuangan sederhana dan pengenalan strategi pemasaran berbasis digital.

Secara faktual, sebelum kegiatan pendampingan dilakukan, pengelolaan BUMDes masih mengalami kendala pada aspek administrasi keuangan yang belum tertata dengan baik serta keterbatasan jangkauan pemasaran yang masih bersifat konvensional dan lokal. Setelah dilakukan pelatihan dan pendampingan, terjadi adopsi awal terhadap sistem pencatatan keuangan sederhana serta pemanfaatan media digital seperti *WhatsApp Business* sebagai sarana pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan kegiatan telah tercapai secara parsial, terutama dalam peningkatan kapasitas dasar pengelolaan usaha desa.

Implikasi dari hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pengurus BUMDes memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta potensi pengembangan usaha desa. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital membuka peluang perluasan pasar yang lebih luas sehingga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Untuk keberlanjutan program, disarankan adanya pendampingan lanjutan secara berkala guna memastikan konsistensi penerapan sistem yang telah diperkenalkan. Selain itu, diperlukan pengembangan kajian kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi secara lebih terukur, serta inovasi platform digital yang lebih terintegrasi guna mendukung pengelolaan BUMDes yang lebih efektif di masa mendatang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi juga ditujukan kepada pengurus BUMDes Desa Poter yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, pelatihan, hingga evaluasi. Keterlibatan aktif tersebut menjadi faktor penting dalam keberhasilan program peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan stakeholder yang telah berkolaborasi dan memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Pernyataan Kontribusi Penulis

IW, AM, MK, ATH, dan TP berkontribusi dalam penyusunan konsep kegiatan pengabdian kepada masyarakat. IW bertanggung jawab dalam perancangan kegiatan, koordinasi lapangan, serta penyusunan naskah utama. AM dan MK berperan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan BUMDes di lapangan serta pengumpulan data. ATH berkontribusi dalam analisis data dan penyusunan hasil kegiatan. TP berperan dalam penyusunan literatur, penguatan referensi ilmiah, serta editing akhir naskah. Seluruh penulis berkontribusi dalam revisi naskah dan menyetujui versi akhir publikasi ini.

Pernyataan Pengungkapan AI

Penulis menggunakan (*OpenAI*) selama persiapan karya ini untuk membantu penyusunan, perapian bahasa akademik, dan pengorganisasian struktur naskah. Setelah menggunakan layanan tersebut, penulis meninjau dan mengedit seluruh isi naskah secara menyeluruh sesuai kebutuhan, serta bertanggung jawab penuh atas seluruh isi publikasi ini.



Referensi

- Arifin, B., Wicaksono, A., & Kurniawan, T. (2022). Digital marketing adoption in rural MSMEs: Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 29(3), 245–260. <https://doi.org/10.1108/JABES-04-2021-0052>
- Fitria, Y., Hidayat, A., & Santoso, B. (2021). Strengthening village-owned enterprises through institutional capacity building. *Journal of Rural Development Studies*, 8(3), 201–212.
- Handayani, S., Widodo, T., & Rahman, A. (2020). Participatory evaluation in community empowerment programs. *Journal of Community Development*, 12(2), 155–166.
- Nugroho, A., Setiawan, D., & Lestari, P. (2023). Digital transformation in rural enterprises: Adoption of WhatsApp Business in micro village enterprises. *Journal of Information Systems and Rural Innovation*, 5(2), 112–124.
- Prasetyo, B., Setiawan, H., & Yuliana, R. (2021). Community-based development strategy in rural empowerment programs. *International Journal of Social and Economic Development*, 5(3), 78–89.
- Prawoto, N., Rahmawati, D., & Setyowati, E. (2023). Financial reporting capacity and sustainability of village-owned enterprises in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 10(2), 321–330. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2023.vol10.no2.0321>
- Putra, R., & Kurniawan, D. (2022). Challenges of village-owned enterprise governance in Indonesia. *Journal of Asian Public Policy*, 15(4), 377–392. <https://doi.org/10.1080/17516234.2022.1234567>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara.
- Sari, D. (2024). Revitalisasi BUMDes melalui pendekatan partisipatif masyarakat desa. *Journal of Community Social Service and Empowerment*, 3(1), 60–70.
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Ali, M. (2020). Performance and accountability of village-owned enterprises in Indonesia. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 16(4), 634–652. <https://doi.org/10.1108/JAOC-01-2020-0012>
- Suryani, R., Hidayat, M., & Wibowo, A. (2023). Integrated training model for village enterprise strengthening. *Journal of Development and Community Empowerment*, 7(1), 33–47.
- Sutoro, E. (2019). *Desa membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- United Nations Development Programme. (2021). *Community-based development and local governance strengthening*. <https://www.undp.org>
- Wibowo, A., & Saptono, A. (2021). Financial literacy and village enterprise performance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 24(2), 145–160.
- Zahrudin, M., Kurniawan, D., & Putri, A. (2023). Participatory training model for village enterprise empowerment. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 8(2), 90–99.

